



**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA
(R E N J A)**

**TAHUN ANGGARAN
2026**

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

Kotapinang, Juni 2025

KATA PENGANTAR

Penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan dalam peraturan tersebut. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2026 disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) BKAD Tahun 2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2005-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun (2021-2026).

Lebih lanjut isi dari Rencana Kerja (Renja) ini adalah gambaran perencanaan berbagai rencana pembangunan yang menjadi bagian dari Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang mana dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi, serta memperhatikan berbagai kondisi dan potensi lokal yang akan menjadi bagian dalam proses pembangunan dimasa-masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Diharapkan dokumen ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Kotapinang, Juni 2025

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

**IMRON ROSADI SIREGAR, S. Pd, M.M.
PEMBINA Tk. I (IV/b)
NIP. 19731110 199903 1 004.**

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Lampiran	
BAB I : PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-4
1.4 Sistematika Penulisan	I-5
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN LALU (2024)	II-7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BKAD Tahun Lalu (2024) dan Capaian Renstra BKAD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2021-2026	II-7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	II-15
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	II-17
2.4 Review terhadap Rencan Kerja Perangkat Daerah	II-28
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	III-38
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	III-38
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BKAD	III-39
3.3 Program dan Kegiatan	III-41
BAB VI : P E N U T U P	VI-46

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan pembangunan perlu didasarkan pada pemahaman data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap dan komprehensif tentang potensi daerah, penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara terus menerus dengan para pemangku kepentingan. Dengan demikian akan menghasilkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dan dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 6 Desember 2016 secara partisipatif, koordinatif, sinergis dan komprehensif menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) SKPD pada setiap tahunnya sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk 1 (satu) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan yang bersifat indikatif didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di daerah dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*treathment*) yang ada atau mungkin timbul dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai dengan mengacu pada dokumen Renja SKPD. Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 yang telah disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun (2021-2026) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Fungsi Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah sebagai tolok ukur dari pencapaian visi, misi, tujuan dan program Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang diharapkan mampu menciptakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Rencana Kerja (Renja) yang disusun merupakan langkah awal untuk melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan yang dalam penyusunannya mengacu pada visi dan misi dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah yang baik tercermin dalam sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Adapun proses penyusunan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah sebagai berikut :

1. Review Renstra SKPD yang berkaitan dengan :
 - Prioritas program;
 - Target program;
 - Perkiraan pencapaian hingga tahun sedang berjalan.
2. Analisis kondisi dan masalah sektor BKAD;
3. Perumusan tujuan dan sasaran tahun rencana;
4. Identifikasi program kegiatan yang ditangani BKAD ;
5. Kebutuhan program dan kegiatan BKAD tahun rencana;
6. Identifikasi prioritas program dan pagu indikatif BKAD;
7. Rencana Kerja (Renja) BKAD berkaitan dengan :
 - Kebijakan;
 - Program dan pagu indikatif;
 - Kegiatan dan anggaran;
 - Jenis belanja;
 - Lokasi kegiatan;
 - Indikator keluaran;
 - Unit pelaksana.
8. Formulasi Rencana Kerja (Renja) BKAD berkaitan dengan :
 - Kebijakan;
 - Program dan pagu indikatif;
 - Kegiatan dan anggaran;
 - Jenis belanja;
 - Lokasi kegiatan;
 - Indikator keluaran;
 - Unit pelaksana;
9. Dokumen Rencana Kerja (Renja).

1.2. Landasan Hukum

Adapun pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) BKAD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2026 dengan memperhatikan pada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan RKPD (dasar hukum) yakni sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2012 Tentang Petunjuk pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2005-2025;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu

- Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 6 Desember 2016;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah BKAD Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2026, serta untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan setiap tahunnya dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Secara lebih spesifik, maksud disusun Rencana Kerja (Renja) BKAD Kabupaten Labuhanbatu Selatan, antara lain :

1. Sebagai acuan bagi seluruh jajaran staf Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dalam menentukan prioritas program dan kegiatan.
2. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan.
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati Labuhanbatu Selatan.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BKAD Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) BKAD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2026 adalah merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu satu tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efisien, efektif dan profesional guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun (2021-2026) dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD (2005-2025).

Secara spesifik tujuan disusun Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan, antara lain :

1. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur BKAD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

3. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur BKAD dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 1 (satu) tahun.
4. Memberikan pedoman alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah pada rentang 1 (satu) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian RKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Fungsi Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan RKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan, keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Dokumen Pembangunan Lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKPD BKAD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BKAD Tahun Lalu (2024) dan Capaian Renstra BKAD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2021-2026

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun lalu (Tahun 2024). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKAD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKAD

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BKAD, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahunan yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rencana Kerja BKAD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran RKPD BKAD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai rancangan awal RKPD.

BAB IV : PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RKPD
TAHUN LALU (2024)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD BKAD Tahun Lalu (2024) dan Capaian Renstra BKAD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2021-2026

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan ditetapkan Berdasarkan dengan adanya Perubahan Nomenklatur sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 6 Desember 2016 dan mulai efektif berjalan terhitung 8 April 2022 maka Badan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Labuhanbatu Selatan berubah menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah atau disingkat (BKAD) merupakan Badan Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Badan Keuangan dan Aset Ddaerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki Kebijakan sebagai berikut, “Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dan kewenangan otonomi daerah di bidang pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan”. Sehingga pencapaian Renstra BPKAD Tahun 2021-2026 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan.

Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan Renstra Tahun 2021-2026 tersebut, pada dasarnya akan bermuara pada peningkatan perencanaan pembangunan serta hasil pembangunan itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut maka evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan secara menyeluruh yang dikaitkan dengan keakuratan perencanaan.

Kondisi daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait dengan urusan perencanaan pembangunan dapat dilihat dari hasil indikator kinerja utama yang bermuara pada ketersediaan dokumen perencanaan. Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Seluruh dokumen perencanaan tersebut, sampai dengan tahun anggaran 2018 telah selesai diantaranya RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2005-2025 telah ditetapkan dengan peraturan daerah, RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2016-2021 telah ditetapkan dengan peraturan daerah, Renstra SKPD tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2024 yang diamanatkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada tahun anggaran 2024 BKAD telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya yaitu menyusun dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) SKPD dilaksanakan setelah selesai tahun anggaran berjalan, hasil dari evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD pada tahun selanjutnya. Sebagai Institusi Pemerintahan maka evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) SKPD dan pencapaian Renstra Tahun 2021-2026 SKPD disajikan sebagaimana pada tabel 2.2 Evaluasi Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024.

Tabel 2.2. Evaluasi Hasil Rencana Kerja (Renja) SKPD TA 2024

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN IV TAHUN 2024

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran Pembangunan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan :

- Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Ketepatan Penyusunan Laporan Keuangan
- Ketepatan Waktu Penetapan APBD dan Pertanggungjawaban APBD
- Persentase Silpa Terhadap APBD

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target RENSTRA OPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD Sampai Dengan Renja OPD Tahun Lalu (s/d 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA OPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 (2026))		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit OPD Penganggung Jawab											
								I (satu)		II (dua)		III (tiga)		IV (empat)																			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN																																	
01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		97.305.621.950		127	18.081.858.606	3.295.691.675	3.768.887.672	2.814.280.317	7.036.885.799	16.915.745.463	62.011.073.108																				
01 2.01	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.954.254		8	15.546.105	0	1.350.000	0	0	0	14.176.964	15.526.964,00	15.526.964																		
01 2.01 01	01	Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	Dokumen	8.094.497	7	Dokumen	0	3	Dokumen	3.868.838	0	Dokumen	1.350.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	3	Dokumen	2.516.736	3	Dokumen	3.866.736	10	Dokumen	3.866.736	66,67	47,83	BPKAD
01 2.01 02	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	Dokumen	6.475.739	2	Dokumen	0	1	Dokumen	3.713.645	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	3.709.336	1	Dokumen	3.709.336	3	Dokumen	3.709.336	60,00	57,28	BPKAD
01 2.01 03	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dokumen	6.808.821	2	Dokumen	0	1	Dokumen	3.776.393	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	3.772.084	1	Dokumen	3.772.084	3	Dokumen	3.772.084	60,00	55,40	BPKAD
01 2.01 04	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dokumen	5.727.839	2	Dokumen	0	1	Dokumen	1.616.262	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	1.614.580	1	Dokumen	1.614.580	3	Dokumen	1.614.580	60,00	28,19	BPKAD
01 2.01 05	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen	5.877.419	2	Dokumen	0	1	Dokumen	1.558.086	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	1.554.700	1	Dokumen	1.554.700	3	Dokumen	1.554.700	60,00	26,45	BPKAD
01 2.01 06	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan	4.979.939	2	Laporan	0	1	Laporan	1.012.881	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	1	Laporan	1.009.528	1	Laporan	1.009.528	3	Laporan	1.009.528	60,00	20,27	BPKAD
Rata-rata Capaian Kinerja Per Kegiatan												100,00	99,88			62,50	40,91																
Predikat Kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah																
01 2.02	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	87.146.796.021		39.323.625.488	23	14.967.115.602	1.914.512.346	3.302.363.882	2.381.801.623	6.369.310.045	13.967.987.896	53.291.613.384																			
01 2.02 01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105	Orang / bulan	86.162.299.478	63	Orang / bulan	38.960.879.888	21	Orang / bulan	14.800.934.801	21	Orang / bulan	1.913.512.346	0	Orang / bulan	3.285.465.082	0	Orang / bulan	2.321.458.223	0	Orang / bulan	6.299.567.045	21	Orang / bulan	13.820.002.696	80	Orang / bulan	52.780.882.584	80,00	61,26	BPKAD
01 2.02 02	01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi/Pelaksanaan Tugas ASN	5	Dokumen	452.194.910	3	Dokumen	240.571.300	1	Dokumen	76.331.403	0	Dokumen	0	0	Dokumen	16.898.800	0	Dokumen	13.323.400	1	Dokumen	45.983.000	1	Dokumen	76.205.200	4	Dokumen	316.776.500	80,00	70,05	BPKAD
01 2.02 03	01	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	Dokumen	518.799.919	3	Dokumen	122.174.300	1	Dokumen	89.849.398	0	Dokumen	1.000.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	47.020.000	1	Dokumen	23.760.000	1	Dokumen	71.780.000	4	Dokumen	193.954.300	80,00	37,39	BPKAD
01 2.02 05	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan	6.748.616	2	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	2	Laporan	0	40,00	0,00	BPKAD

02.2.02.06		Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	5	Dokumen	196.468.627	3	Dokumen	138.837.600	1	Dokumen	24.995.730	1	Dokumen	24.802.900	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	1	Dokumen	24.802.900	4	Dokumen	163.640.500	80,00	83,29	BPKAD	
02.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan	5	Laporan	265.456.386	3	Laporan	96.595.700	1	Laporan	54.513.535	1	Laporan	36.408.200	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	18.067.500	1	Laporan	54.475.700	4	Laporan	151.071.400	80,00	56,91	BPKAD
02.2.02.08		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	3	Dokumen	92.820.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0,00	0,00	BPKAD
02.2.02.09		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	5	Dokumen	166.142.304	3	Dokumen	117.326.300	1	Dokumen	24.240.550	1	Dokumen	9.324.300	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	13.158.000	1	Dokumen	22.482.300	4	Dokumen	139.808.600	80,00	84,15	BPKAD
02.2.02.10		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	3	Dokumen	877.710.202	1	Dokumen	52.844.400	1	Dokumen	43.279.938	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	26.849.900	1	Dokumen	26.849.900	2	Dokumen	79.694.300	66,67	9,08	BPKAD
02.2.02.11		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	3	Dokumen	324.870.000	1	Dokumen	31.048.550	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	31.048.550	33,33	9,56	BPKAD
Rata-rata Capaian Kinerja Per Kegiatan																						100,00	90,28			58,54	21,45						
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah						
02.2.03	Meningkatnya Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			5.962.892.038		1.637.145.592	56		876.207.980		36.997.800		140.454.942		278.968.110		293.637.980		750.058.832		2.387.204.424										
02.2.03.01		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	5	Laporan	103.903.036	1	Laporan	1.542.400	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	1	Laporan	1.542.400	20,00	1,48	BPKAD			
02.2.03.02		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	5	Dokumen	102.783.122	1	Dokumen	4.950.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	4.950.000	20,00	4,82	BPKAD			
02.2.03.03		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	5	Laporan	162.435.000	18	Laporan	16.169.300	18	Laporan	16.305.164	4	Laporan	5.979.100	0	Laporan	1.287.000	0	Laporan	7.520.000	14	Laporan	1.020.000	18	Laporan	15.806.100	36	Laporan	31.975.400	720,00	19,69	BPKAD
02.2.03.04		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	5	Laporan	992.192.186	3	Laporan	298.500.100	1	Laporan	173.872.281	0	Laporan	16.641.700	1	Laporan	132.017.942	0	Laporan	1.350.000	0	Laporan	21.205.000	1	Laporan	171.214.642	4	Laporan	469.714.742	80,00	47,34	BPKAD
02.2.03.05		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10	Dokumen	2.379.926.194	6	Dokumen	916.193.000	2	Dokumen	350.942.788	0	Dokumen	14.377.000	0	Dokumen	7.150.000	2	Dokumen	245.493.000	0	Dokumen	267.020.000	8	Dokumen	1.183.213.000	80,00	49,72	BPKAD			
02.2.03.09		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1	Dokumen	835.380.000	1	Dokumen	80.388.400	1	Dokumen	16.594.775	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	80.388.400	100,00	9,62	BPKAD

02.2.03.10		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Berdasarkan Peraturan Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Berdasarkan Peraturan Daerah	1	Dokumen	900.379.508	1	Dokumen	76.518.492	1	Dokumen	41.457.121	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	20.305.110	0	1	Dokumen	20.305.110	2	Dokumen	96.823.602	200,00	10,75	BPKAD																										
02.2.03.11		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	33	Orang	393.072.992	109	Orang	242.883.900	33	Orang	277.035.851	0	Orang	0	0	Orang	0	0	Orang	4.300.000	33	Orang	271.412.980	33	Orang	275.712.980	142	Orang	518.596.880	430,30	131,93	BPKAD																								
02.2.03.12		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Didina	1	Lembaga	92.820.000	0	Lembaga	0	0	Lembaga	0	0	Lembaga	0	0	Lembaga	0	0	Lembaga	0	0	Lembaga	0	0	Lembaga	0	0	0,00	0,00	BPKAD																										
Rata-rata Capaian Kinerja Per Kegiatan																							98,21	85,60																																	
Predikat Kinerja																							Sangat Tinggi	Tinggi																																	
02.2.04	Meningkatnya Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			841.311.782.209			369.300.212.584	3		128.686.781.055			13.907.651.616				7.921.314.632			72.137.290.016			28.986.659.664			122.952.915.928,00			492.253.128.512					Sangat Tinggi	Sangat Rendah																				
02.2.04.08		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	5	Laporan	741.755.788.054	3	Laporan	356.657.371.258	1	Laporan	120.995.954.500	0	Laporan	13.907.651.616	0	Laporan	7.921.314.632	0	Laporan	72.137.290.016	1	Laporan	26.630.609.128	1	Laporan	120.596.865.392	4	Laporan	477.254.236.650	80,00	64,34	BPKAD																								
02.2.04.09		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5	Laporan	60.000.000.000	3	Laporan	1.807.571.524	1	Laporan	3.047.948.369	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	1	Laporan	17.980.000	1	Laporan	17.980.000	4	Laporan	1.825.551.524	80,00	3,04	BPKAD																								
02.2.04.10		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	5	Laporan	39.555.994.155	3	Laporan	10.835.269.802	1	Laporan	4.642.878.186	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	1	Laporan	2.338.070.536	1	Laporan	2.338.070.536	4	Laporan	13.173.340.338	80,00	33,30	BPKAD																								
Rata-rata Capaian Kinerja Per Kegiatan																							100,00	95,54																																	
Predikat Kinerja																							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																																Tinggi	Rendah
02.2.05	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			230.000.000			126.392.100	1		0			0				0						0					126.392.100																											
02.2.05.02		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1	Dokumen	230.000.000	1	Dokumen	126.392.100	1	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	126.392.100	100,00	54,95	BPKAD																								
Rata-rata Capaian Kinerja Per Kegiatan																							0,00	0,00																																	
Predikat Kinerja																							Sangat Rendah	Sangat Rendah																																	
03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				3.643.408.813			44		1.086.582.989			3.940.000			4.498.000			154.841.259			773.221.515			936.500.774			2.096.242.805																												
03.2.01	Meningkatnya Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah			3.643.408.813			1.159.742.031	44		1.086.582.989			3.940.000			4.498.000			154.841.259			773.221.515			936.500.774			2.096.242.805																											
03.2.01.01		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	5	Dokumen	527.990.465	3	Dokumen	194.984.956	1	Dokumen	64.088.878	0	Dokumen	2.440.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	28.061.600	1	Dokumen	32.750.000	1	Dokumen	63.251.600	4	Dokumen	258.236.556	80,00	48,91	BPKAD																								
03.2.01.02		Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	5	Dokumen	152.311.381	3	Dokumen	55.554.500	2	Dokumen	21.501.842	0	Dokumen	1.500.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	13.559.800	2	Dokumen	5.725.000	2	Dokumen	20.784.800	5	Dokumen	76.339.300	100,00	50,12	BPKAD																								
03.2.01.03		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	5	Dokumen	112.311.596	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	0,00	0,00	0,00	BPKAD																									
03.2.01.04		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5	Dokumen	84.230.848	1	Dokumen	27.002.590	1	Dokumen	33.421.056	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	33.384.300	1	Dokumen	33.384.300	2	Dokumen	60.386.890	40,00	71,69	BPKAD																								
03.2.01.05		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	5	Laporan	114.229.672	1	Laporan	18.471.000	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	1	Laporan	18.471.000	20,00	16,17	BPKAD																								
03.2.01.06		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah	5	Laporan	271.234.321	3	Laporan	186.945.289	1	Laporan	94.540.943	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	1	Laporan	81.610.239	1	Laporan	81.610.239	4	Laporan	268.555.528	80,00	99,01	BPKAD																								
03.2.01.07		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	5	Laporan	210.583.353	1	Laporan	86.171.200	1	Laporan	495.450.503	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	63.825.000	1	Laporan	395.341.220	1	Laporan	459.166.220	2	Laporan	545.337.420	40,00	258,97	BPKAD																								
03.2.01.08		Penilaian Barang Milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5	Laporan	489.548.822	3	Laporan	190.515.701	1	Laporan	79.194.830	0	Laporan	4.498.000	0	Laporan	23.025.000	1	Laporan	9.667.400	1	Laporan	37.190.400	4	Laporan	227.706.101	80,00	46,51	BPKAD																											
03.2.01.09		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	5	Laporan	285.582.633	3	Laporan	113.648.340	1	Laporan	94.289.393	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	1	Laporan	90.919.800	1	Laporan	90.919.800	4	Laporan	204.568.140	80,00	71,63	BPKAD																								

03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5	Dokumen	496.169.023	3	Dokumen	67.380.732	1	Dokumen	79.687.598	0	Dokumen	0	0	Dokumen	26.369.859	1	Dokumen	22.101.256	1	Dokumen	48.471.115	4	Dokumen	115.851.847	80,00	23,35	BPKAD																		
03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5	Laporan	502.784.647	3	Laporan	110.047.523	1	Laporan	64.079.182	0	Laporan	0	0	Laporan	0	1	Laporan	63.347.900	1	Laporan	63.347.900	4	Laporan	173.395.423	80,00	34,49	BPKAD																		
03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	5	Laporan	165.387.597	2	Laporan	50.740.000	1	Laporan	30.149.392	0	Laporan	0	0	Laporan	0	1	Laporan	30.003.400	1	Laporan	30.003.400	3	Laporan	80.743.400	60,00	48,82	BPKAD																		
03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	33	Orang	231.044.454	70	Orang	58.280.200	33	Orang	30.179.372	0	Orang	0	0	Orang	0	0	Orang	8.371.000	33	Orang	8.371.000	103	Orang	66.651.200	312,12	28,85	BPKAD																		
Rata-rata Capaian Kinerja Per Kegiatan																						100,00	86,19			150,54	57,54																						
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah																						
Jumlah Total					955.903.673.722		420.357.258.741	313		150.348.696.141		17.367.005.391		12.097.864.404		75.744.200.075		37.809.021.898		143.018.091.768,00		563.375.350.509		85,57	58,94																								
Rata-rata Capaian Kinerja Seluruh Program																																																	
Predikat Kinerja																																																	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan dengan mempertimbangkan adanya situasi Perubahan Nomenklatur sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 6 Desember 2016 dan mulai efektif berjalan terhitung 8 April 2022 maka dilakukan beberapa perubahan dalam anggaran untuk Tahun Anggaran 2022, mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Keberadaan BPKAD sebagai leading sektor, pengelolaan keuangan dan aset di daerah, memiliki tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset yang tertib, akuntabel dan optimal sehingga mendukung optimalisasi pembangunan daerah. Selain itu BKAD berkewajiban menjadi motor bagi terciptanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pencapaian tata kelola keuangan dan aset daerah yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam proses pelaksanaan tugas BKAD Kab. Labuhanbatu selatan diharapkan terjadi kondisi sebagai berikut :

1. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergisitas antar SKPD dan Instansi serta Stakeholders lainnya dalam urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sebagai upaya menciptakan kondisi yang diinginkan maka peningkatan kualitas BKAD sebagai pengelola keuangan dan aset daerah harus terus dipacu dan ditingkatkan. Selain itu perlu dilakukan identifikasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, agar layanan yang dijalankan senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan, maka identifikasi dan evaluasi pelayanan dapat dilihat dari kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BKAD dan Bagian Keuangan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Rencana Kerja (Renja) BKAD. Namun sebagai Institusi baru berdasarkan peraturan, BKAD mempunyai Dokumen Perencanaan sendiri yaitu Rencana Kerja (Renja) dan Indikator Kinerja Utama (IKU), sehingga identifikasi dan evaluasi kinerja pelayanan BKAD berjalan berdasarkan evaluasi Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tabel 2.3 dan IKU pada Lampiran.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

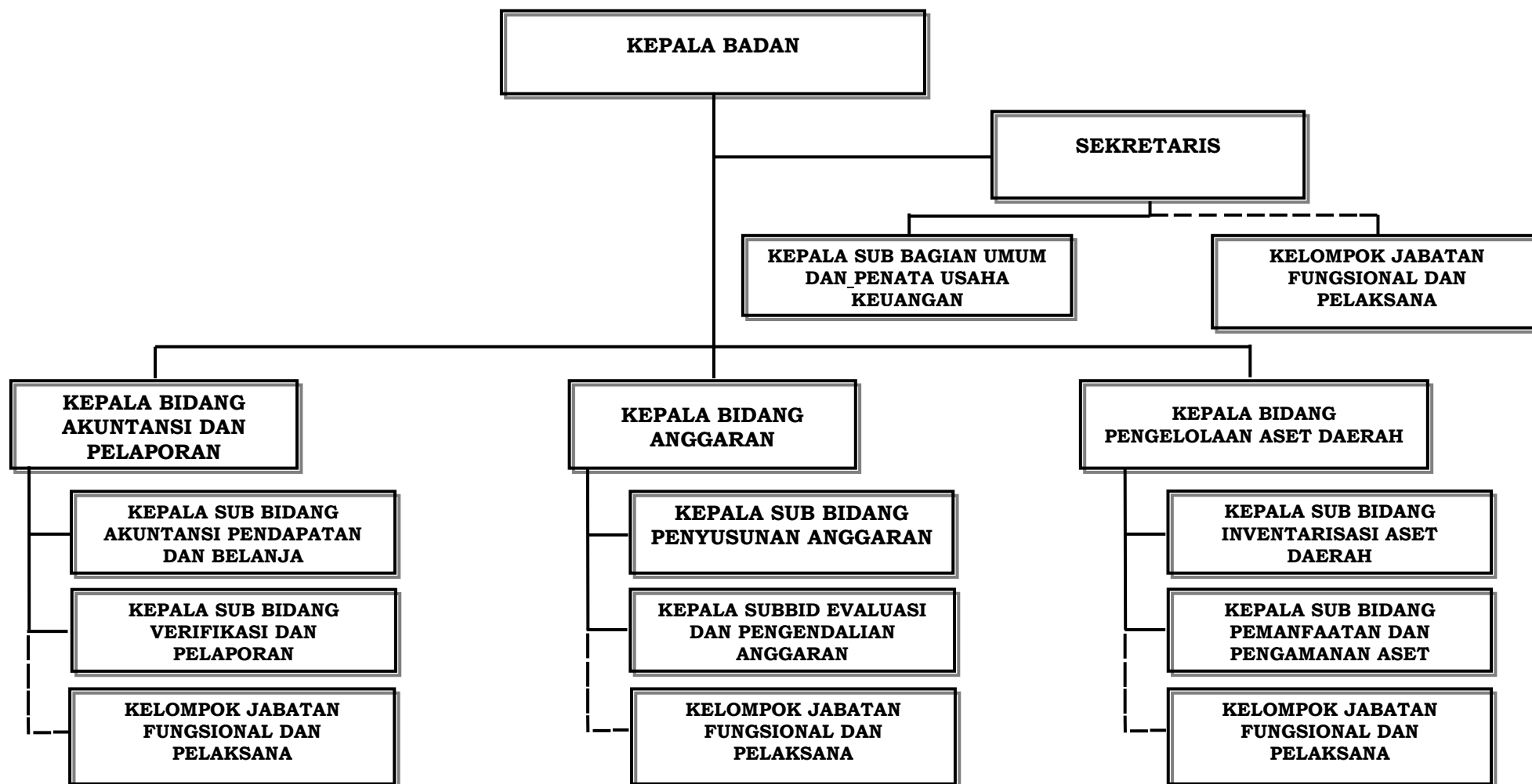
Kedudukan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, untuk selanjutnya disingkat (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan dengan adanya situasi Perubahan Nomenklatur sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 6 Desember 2016 dan mulai efektif berjalan terhitung 8 April 2022 maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Labuhanbatu Selatan berubah menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah atau disingkat (BKAD) merupakan Badan Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki Kebijakan sebagai berikut, “Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dan kewenangan otonomi daerah di bidang pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan”.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdiri dari :

- A. Badan;
- B. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Penatausaha Keuangan
- C. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja.
 2. Sub Bidang Verifikasi dan Pelaporan;
- D. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran;
- E. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Ast Daerah;
 2. Sub Bidang Inventarisasi Aset Daerah
- F. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja BKAD Kabupaten Labuhanbatu Selatan di bawah ini :

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI BKAD



Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dirincikan sebagai berikut :

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TUGAS POKOK

Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah dan kewenangan otonomi daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

FUNGSI

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Mengkoordinasikan penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
3. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
4. Penyusunan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
5. Merumuskan penetapan Perda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD dan PAPBD;
6. Merumuskan penetapan kebijakan sisdur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Merumuskan kebijakan operasional pengelolaan keuangan daerah sebagai pedoman pelaksanaan APBD;
8. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
9. Melaksanakan pengesahan DPA – SKPD dan DPPA – SKPD ;
10. Menyelenggarakan pembinaan pengelolaan keuangan dan barang daerah ;
11. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi tentang Pengelolaan Investasi, Aset daerah, BUMD, pinjaman dan obligasi daerah serta BLU Kabupaten;
12. Merumuskan perhitungan alokasi DAU dan realisasi Dana Bagi Hasil serta usulan program untuk didanai dari DAK;
13. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

SEKRETARIAT TUGAS POKOK

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian pelayanan secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bagian umum, kepegawaian, keuangan, program serta pelaporan aset dilingkungan badan.

FUNGSI

1. Penyusunan rencana kegiatan badan;
2. Penyelenggaraan administrasi umum di lingkungan badan;
3. Pelaksanaan serta menyusun pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum;
4. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum;
5. Penyelenggaraan urusan rumahtangga badan; dan
6. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan atasan;

URAIAN TUGAS

1. Merencanakan Kebijakan operasional sekretariat berdasarkan kebijakan umum, rencana strategis dan rencana kerja badan sebagai pedoman kerja;
2. Melakukan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan;
3. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan tentang program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan untuk penunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di sekretariat sesuai rencana yang ditetapkan;
5. Mengarahkan disposisi dan perintah lisan/tertulis pimpinan kepada bidang bersangkutan sesuai tugas pokoknya;
6. Mengkoordinasikan penyiapan bahan materi dan penyusun rencana strategis (Renstra) SKPD, rencana kerja (Renja), KUA-PPAS, RKA-SKPD, DPA-SKPD, RKAP-SKPD, DPPA-SKPD, laporan kinerja bulanan, triwulan dan tahunan serta LKPJ dan LPPD berdasarkan bahan dan materi sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku;
7. Mengkoordinasikan dan meneliti kelengkapan SPP- LS, SPP-UP, SPP-GU, SPP- TU, SPP-LS gaji dan tunjangan/tambahan penghasilan serta verifikasi SPP sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Mengkoordinasikan dan mengelola surat menyurat dan kearsipan, pengadaan dan pendistribusian alat tulis kantor (ATK), barang perlengkapan dan peralatan kantor serta pengadaan bahan pustaka;
9. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan usulan penghapusan barang inventaris, pengguna saranan dan fasilitas kantor, pengaturan perjalanan dinas, pemeliharaan kebersihan, perawatan dan pengamanan kantor serta lingkungannya;
10. Mengkoordinasikan penyiapan penyelenggara upacara, apel, acara keagamaan dan kegiatan kantor lainnya serta rapat badan, rapat badan dengan instansi pemerintah maupun dengan swasta dan penerima tamu;
11. Mengkoordinasikan pelaksanaan dokumentasi yang berkaitan dengan kebijakan dan kegiatan instansi terkait, mendokumentasikan berita dan penyelenggara hubungan masyarakat serta pendokumentasikan produk hukum kepegawaian;
12. Menyelia penyelesaian administrasi pegawai meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, bazetting, DUK, SKP dan administrasi kepegawaian lainnya;
13. Menilai bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;

14. Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan sekretariat kepada kepala badan secara lisan maupun tulisan; dan
15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

SUB BAGIAN UMUM DAN PENATA USAHA KEUANGAN TUGAS POKOK

Sub Bagian Umum dan Penata Usaha Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris di bidang Umum, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga serta penatausahaan pengelolaan keuangan dilingkungan Badan.

URAIAN TUGAS

1. Menyusun rencana program/kegiatan Sub Bagian;
2. Menyelenggarakan administrasi surat menyurat termasuk penanganan arsip di lingkungan Badan;
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan tata naskah dinas di lingkungan Badan;
4. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
5. Menyelenggarakan urusan ketertiban, keamanan, kebersihan, dan keindahan di lingkungan Badan;
6. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan penerimaan tamu, keprotokolan, penyediaan fasilitas rapat-rapat Badan dan upacara kantor;
7. Melaksanakan rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan, inventarisasi dan usul penghapusan barang/Aset Badan;
8. Menghimpun dan mengolah data serta informasi dalam rangka penatausahaan keuangan;
9. Melaksanakan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan SKPD;
10. Melakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan SKPD ;
11. Pelaksanaan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan di lingkungan Badan ;
12. Melakukan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan, meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pembukuan;
13. Melakukan mengoordinasikan dan menyusun kebijakan laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan;
14. Meneliti dan menguji kelengkapan surat permintaan pembayaran dan surat pertanggungjawaban dalam rangka penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
15. Menyiapkan dan mengadministrasikan Surat Perintah Membayar (SPM);
16. Melakukan verifikasi, meneliti dan menguji setiap dokumen/ bukti serta Surat Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran;
17. Melaksanakan akuntansi pengelolaan keuangan anggaran Badan;
18. Melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
19. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN TUGAS POKOK

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam melakukan kegiatan administrasi, penatausahaan keuangan dan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan daerah.

FUNGSI

1. Merumuskan perencanaan program/kegiatan Bidang;
2. Menyusun rumusan penetapan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Menyusun kebijakan Peraturan Kepala Daerah tentang sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah, mekanisme dan tata cara verifikasi, evaluasi dan laporan keuangan serta analisis atas laporan pertanggungjawaban keuangan SKPD;
4. Mengkoodinasikan dan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah;
5. Menyusun rumusan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
6. Menghimpun laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dari setiap SKPD;
7. Melakukan evaluasi, analisis serta verifikasi atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran SKPD;
8. Menghimpun laporan keuangan SKPD secara periodik;
9. Melakukan pembinaan akuntansi pada setiap SKPD;
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

SUB BIDANG AKUNTANSI PENDAPATAN DAN BELANJA TUGAS POKOK

Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang dalam menyelenggarakan penatausahaan akuntansi pendapatan dan belanja daerah.

RINCIAN TUGAS

1. Menyusun rencana program/kegiatan Sub Bidang;
2. Menyusun kebijakan peraturan kepala daerah tentang mekanisme dan prosedur akuntansi pendapatan dan belanja daerah;
3. Melakukan pembinaan penatausahaan penerimaan dan belanja daerah pada SKPD;
4. Menyelenggarakan sistem akuntansi pendapatan dan belanja daerah;
5. Menghimpun laporan realisasi pendapatan dan belanja SKPD;
6. Melakukan pembinaan sistem akuntansi pendapatan dan belanja daerah pada SKPD;
7. Menyelenggarakan prosedur akuntansi aset;
8. Menyelenggarakan prosedur selain kas;
9. Mendokumentasikan bukti memorial;
10. Menyusun laporan realisasi keuangan daerah semester pertama dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
11. Melakukan koordinasi dengan SKPD/Unit Kerja lainnya dalam penyusunan laporan keuangan daerah;

12. Menyusun rumusan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

SUB BIDANG VERIFIKASI DAN PELAPORAN TUGAS POKOK

Sub Bidang Verifikasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang dalam melakukan verifikasi dan tata usaha pendapatan dan belanja daerah.

URAIAN TUGAS

1. Menyusun rencana program/kegiatan Seksi;
2. Menyusun kebijakan peraturan kepala daerah tentang mekanisme dan tata cara evaluasi, analisis dan verifikasi terhadap penerimaan dan belanja daerah;
3. Melakukan evaluasi, analisis dan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada SKPD;
4. Melakukan evaluasi, analisis dan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pada SKPD;
5. Melaksanakan pengujian kesesuaian atas SPM yang diajukan SKPD terhadap ketersediaan pagu dana;
6. Menerbitkan penolakan SPM atas pengajuan pembayaran belanja;
7. Melaksanakan pembinaan atas penatausahaan keuangan SKPD;
8. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan bahan-bahan petunjuk pemecahan masalah yang berhubungan dengan penatausahaan keuangan;
9. Melakukan koordinasi dengan SKPD/Unit Kerja lainnya dalam penyusunan laporan keuangan daerah, serta menyusun rumusan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

BIDANG ANGGARAN TUGAS POKOK

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dalam mengoordinasikan, menyusun kebijakan perencanaan dan pedoman pelaksanaan APBD.

FUNGSI

1. Merumuskan perencanaan program/kegiatan Bidang;
2. Menyusun rencana prioritas dan plafon anggaran sementara;
3. Mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan R-APBD dan R-PAPBD;
4. Mengoordinasikan penyusunan tentang Ranperda APBD dan P-APBD;
5. Mengoordinasikan, penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD;
6. Meneliti dan memproses pengesahan DPA/DPPA-SKPD;
7. Melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan APBD;
8. Menyusun rumusan penetapan standar analisis belanja;
9. Melaksanakan evaluasi APB Desa;

10. Menyelenggarakan pelaksanaan Sistem Informasi Keuangan Daerah
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN TUGAS POKOK

Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang dalam penyusunan KUA, PPAS/PPA, R-APBD, R-PAPBD, dan nota keuangan serta proses pengesahan DPA/DPPA SKPD.

URAIAN TUGAS

1. Menyusun rencana program/kegiatan sub bidang;
2. Mengumpulkan bahan-bahan untuk penyusunan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi KUA;
3. Menyusun rencana Prioritas dan Palafon Anggaran Sementara (PPAS) ;
4. Menyusun rancangan nota kesepakatan tentang KUA dan APBD;
5. Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD;
6. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, PAPBD, dan nota keuangan;
7. Mempersiapkan sosialisasi Rancangan APBD/P-APBD;
8. Menyusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dan P-APBD;
9. Menyelenggarakan pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah pada sub Bidang nya ;
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

SUB BIDANG EVALUASI DAN PENGENDALIAN ANGGARAN TUGAS POKOK

Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang dalam pelaksanaan evaluasi dan pengendalian anggaran.

RINCIAN TUGAS

1. Menyusun rencana program/kegiatan sub bidang;
2. Menyusun rumusan Peraturan Bupati tentang Standar Analisa Belanja;
3. Menyusun rumusan Peraturan Bupati tentang Besaran Biaya Perjalanan Dinas;
4. Menyusun rumusan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum;
5. Menyusun rumusan kebijakan yang berkenaan dengan pelaksanaan APBD;
6. Melakukan pengendalian terhadap kemampuan keuangan daerah dengan permintaan dana SKPD;
7. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana;
8. Memberikan informasi kepada pimpinan terhadap keadaan kas daerah pada Bank;
9. Melaksanakan pembinaan dalam penyusunan Rancangan APB Desa;
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

BIDANG PENGELOLAAN ASET DAERAH TUGAS POKOK

Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam mengoordinasikan pembinaan administrasi, pemanfaatan, inventarisasi, penilaian dan perubahan status hukum aset daerah serta mengelola investasi daerah.

FUNGSI

1. Merumuskan rencana program/kegiatan Bidang;
2. Menyusun rumusan penetapan standar satuan harga;
3. Menyusun rumusan penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan Aset daerah;
4. Menyusun rumusan penetapan kebijakan pengelolaan BUMD, lembaga keuangan mikro, Badan Usaha Milik Desa, pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU;
5. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan, penatausahaan Inventaris Kekayaan Milik Daerah (IKMD) ;
6. Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi tentang standar satuan harga, investasi, Aset, BUMD, lembaga keuangan mikro, Badan Usaha Milik Desa, pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU;
7. Menginventarisasi kekayaan daerah;
8. Mengkoordinasikan penilaian Aset daerah;
9. Mengkoordinasikan perubahan status hukum Aset daerah;
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

SUB BIDANG INVENTARISASI ASET DAERAH TUGAS POKOK

Sub Bidang Inventarisasi Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang dalam penyelenggaraan dan penatusahaan aset daerah.

RINCIAN TUGAS

1. Menyusun rencana program/kegiatan sub bidang;
2. Menyusun kebijakan dan pembinaan tentang kekayaan daerah (investasi, Aset daerah, lembaga keuangan mikro, Badan Usaha Milik Desa dan BLU);
3. Melakukan koordinasi dalam menyusun rumusan kebijakan pembinaan penatausahaan Inventaris Kekayaan Milik Daerah (IKMD) ;
4. Menghimpun dan mengolah data inventaris Aset dari setiap SKPD ;
5. Menyusun rumusan terhadap status hukum mutasi aset daerah;
6. Melakukan sensus barang;
7. Melakukan sertifikasi barang milik daerah;
8. Menyusun laporan inventarisasi barang daerah setiap semester;
9. Mempersiapkan dokumen penyerahan Aset daerah dari SKPD ke pemerintah daerah;
10. Melakukan penelitian terhadap pelaporan, mutatis-mutandis barang inventaris dari setiap SKPD;

11. Menghimpun data dan menyusun laporan pengadaan barang dan pemeliharaan yang merupakan kompilasi realisasi pengadaan setiap 6 (enam) bulan;
12. Mengelola kekayaan daerah yang diperoleh dari hibah, sumbangan, kontrak bagi hasil dari kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atau sejenis ;
13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

SUB BIDANG PEMANFAATAN DAN PENGAMANAN ASET DAERAH TUGAS POKOK

Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang dalam penyusunan perencanaan pengelolaan pengamanan aset daerah.

RINCIAN TUGAS

1. Menyusun rencana program/kegiatan sub bidang;
2. Menyusun kebijakan pengelolaan investasi daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang;
3. Melakukan sertifikasi barang milik daerah ;
4. Menyusun kebijakan tentang penilaian dan umur ekonomis aset ;
5. Melakukan pengendalian dan pemanfaatan aset
6. Melakukan perencanaan dan penilaian atas Aset permanen maupun non permanen;
7. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain dalam penilaian dan penghapusan aset daerah ;
8. Melaksanakan administrasi perubahan status hukum (penghapusan/ penjualan) dan pinjam pakai aset daerah ;
9. Merencanakan penetapan portofolio pinjaman daerah;
10. Merencanakan pembayaran pelunasan kembali pinjaman daerah;
11. Menyusun dan merencanakan penghapusan utang dan piutang;
12. Mendokumentasikan Bukti Kepemilikan aset daerah ;
13. Mempersiapkan laporan pengelolaan investasi daerah;
14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TUGAS POKOK

Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, maka BKAD Kabupaten Labuhanbatu Selatan terus berupaya untuk meningkatkan capaian kinerjanya. Adapun kinerja yang ingin dicapai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan antara lain :

1. Opini WTP oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah dan juga didukung oleh akuntabilitas tata kelola pendapatan, Belanja dan aset daerah sebagai salah satu unsur utama dalam pelaporan keuangan daerah.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan stakeholders dalam mendukung pengelolaan aset daerah.

Namun peningkatan tersebut belum optimal, masih banyak potensi yang perlu digali. Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam peningkatan optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Kualitas dan kapasitas SDM BKAD;
2. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
3. Belum dilaksanakan sepenuhnya prosedur standar operasional untuk melaksanakan kegiatan terutama pada pengelolaan aset;
4. Belum ada persepsi/ mindset yang sama antar Stakeholders sehingga masih ada ego sektoral mengutamakan kepentingan masing-masing sehingga tidak sinergis mendukung tujuan dan sasaran;
5. Lebarnya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dengan banyaknya rencana kegiatan.

Salah satu upaya antisipasi yang dibutuhkan adalah mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Adapun isu strategis yang sangat mempengaruhi kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah :

1. Penyusunan APBD dan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara tepat waktu.
2. Penyusunan laporan keuangan tepat waktu dan peningkatan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pengelolaan dan Aset Daerah.
4. Pengelolaan kekayaan dan aset daerah perlu dilakukan secara professional, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pengelolaan Aset Daerah secara tertib dan benar.

Atas dasar itulah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan harus mampu memberikan perbaikan pelayanan dan meningkatkan pemahaman aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga tercapai target pengelolaan keuangan dan aset yang telah direncanakan.

Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dalam ketepatan penyampaian, efisiensi belanja daerah dan optimalisasi pelaksanaan program/kegiatan serta pengelolaan dan penatausahaan aset daerah dilakukan secara profesional sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku juga sangat mempengaruhi terhadap isu-isu strategis didalam upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang dihadapi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

2.4 Review terhadap RKPD

Rencana Kerja (Renja) dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/ Rencana Kerja (Renja) BKAD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2026 kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan di atas khususnya Rencana Kerja (Renja) BKAD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2026 merupakan konsistensi dokumen perencanaan mulai dari RPJPD sampai dengan Rencana Kerja (Renja) yang dilaksanakan BKAD. Namun seiring telah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, maka program kegiatan yang di tampung pada Renja BKAD Kabupaten Labuhanbatu Selatan perlu penyesuaian, dengan kata lain melakukan mapping data seluruh program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah.

Tabel 2.4
Review Terhadap RKPD Tahun 2026 Kabupaten Labuhanbatu Selatan

REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan							
	Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026		Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026					
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif				
5												
5	02											
5	02	01										
5	02	01	2.01									
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	5.222.854	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	5.222.854
5	02	01	2.02	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	6.402.919	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	6.402.919
5	02	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.472.596	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.472.596
5	02	01	2.04	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	6.295.938	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	6.295.938
5	02	01	2.05	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Laporan	6.320.926	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Laporan	6.320.926

5	02	01	2.06	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.092.597	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.092.597
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10.876.500.393	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10.876.500.393
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	240 Orang/bulan	10.531.741.792	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	240 Orang/bulan	10.531.741.792
5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	51.375.833	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	51.375.833
5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	293.382.768	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	293.382.768
5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	-
5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	-
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			365.236.945	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			365.236.945
5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	132.206.402	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	132.206.402
5	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	33 Orang	148.789.143	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	33 Orang	148.789.143
5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	84.241.400	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	84.241.400
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			590.300.003	Administrasi Umum Perangkat Daerah			590.300.003
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang Disediakan	1 Paket	13.850.606	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang Disediakan	1 Paket	13.850.606

5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.153.701	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.153.701
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	32.057.160	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	32.057.160
5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	25.401.756	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	25.401.756
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	503.836.780	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	503.836.780
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			159.097.955	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			159.097.955
5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	-
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13 Unit	53.498.630	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13 Unit	53.498.630
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	105.599.325	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	105.599.325
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			866.649.512	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			866.649.512
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	-
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	386.879.652	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	386.879.652
5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	60.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	60.000.000
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan	419.769.860	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan	419.769.860
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			406.119.560	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			406.119.560
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38.420.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38.420.000

5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	278.999.560	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	278.999.560
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	31.400.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	31.400.000
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	57.300.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	57.300.000
5	02	02			Program Pengelolaan Keuangan Daerah			143.060.624.265	Program Pengelolaan Keuangan Daerah			143.060.624.265
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			1.641.742.693	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			1.641.742.693
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	18.524.892	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	18.524.892
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	18.929.092	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	18.929.092
5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	33 Dokumen	9.675.100	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	33 Dokumen	9.675.100
5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	33 Dokumen	9.446.340	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	33 Dokumen	9.446.340
5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA - SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	33 Dokumen	8.637.079	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA - SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	33 Dokumen	8.637.079
5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	33 Dokumen	8.655.561	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	33 Dokumen	8.655.561
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	276.342.441	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	276.342.441
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	282.411.631	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	282.411.631
5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	85.370.571	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	85.370.571

5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	9.704.394	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	9.704.394
5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	547.727.438	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	547.727.438
5	02	02	2.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	9.633.563	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	9.633.563
5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	120 Orang	356.684.591	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	120 Orang	356.684.591
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			757.918.273	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			757.918.273
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas	1 Dokumen	76.733.325	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas	1 Dokumen	76.733.325
5	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0 Laporan	0	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0 Laporan	0
5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	33 Dokumen	29.293.952	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	33 Dokumen	29.293.952
5	02	02	2.02	0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	0	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	0
5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	0 Dokumen	0	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	0 Dokumen	0
5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	55.505.443	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	55.505.443

5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Laporan	113.608.765	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Laporan	113.608.765
5	02	02	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai	1 Dokumen	0	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai	1 Dokumen	0
5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan	1 Dokumen	64.079.803	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan	1 Dokumen	64.079.803
5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub	1 Dokumen	101.710.149	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub	1 Dokumen	101.710.149
5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	33 Orang	316.986.836	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	33 Orang	316.986.836
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			1.005.420.716	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			1.005.420.716

5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Laporan	0	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Laporan	0
5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	0 Dokumen	0	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	0 Dokumen	0
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan	23.689.989	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan	23.689.989
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	230.123.788	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	230.123.788
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	434.620.103	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	434.620.103
5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	0 Dokumen	-	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	0 Dokumen	-
5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	-	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	-
5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	33 Orang	316.986.836	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	33 Orang	316.986.836
5	02	02	2.03	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	0 Lembaga	-	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	0 Lembaga	0
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			139.655.542.583	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			139.655.542.583

5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	4 Laporan	123.670.653.600	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	4 Laporan	123.670.653.600
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	7.800.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	7.800.000.000
5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil	2 Laporan	8.184.888.983	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil	2 Laporan	8.184.888.983
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			-
5	02	03	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	0 Dokumen	-	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	0 Dokumen	-
5	02	03			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah			1.854.016.688	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah			1.854.016.688
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah			1.854.016.688	Pengelolaan Barang Milik Daerah			1.854.016.688
5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	91.022.920	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	91.022.920
5	02	03	2.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	30.315.757	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	30.315.757
5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	0 Dokumen	0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	0 Dokumen	0
5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	53.669.536	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	53.669.536
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	0 Laporan	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	0 Laporan	0
5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik	1 Laporan	150.259.536	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik	1 Laporan	150.259.536
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik	1 Laporan	462.441.509	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik	1 Laporan	462.441.509
5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	122.285.293	Penilaian Barang Milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	122.285.293

5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	91.063.247	Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	91.063.247
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	451.194.429	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	451.194.429
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang	1 Laporan	97.432.443	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang	1 Laporan	97.432.443
5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	42.132.002	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	42.132.002
5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	66 Orang	262.200.016	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	66 Orang	262.200.016

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Keterkaitan renstra Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia ditelaah berdasarkan Visi yang ditetapkan diantara keduanya. Visi Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 adalah “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan” untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : ”Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya :

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan
6. Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Agenda Pembangunan 7

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Kementerian Keuangan dalam Agenda Pembangunan 7 RPJMN tahun 2020-2024 diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu 1) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri; 2) Penegakan Hukum Nasional; dan 3) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Arah kebijakan Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dilaksanakan dengan strategi:
 - a. Memperkuat integritas wilayah NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri, melalui Peningkatan kerja sama internasional dalam pencegahan dan penanganan kejahatan trans-nasional.
 - b. Memperkuat kerja sama pembangunan internasional, melalui Penguatan KSST untuk mendukung perdagangan dan investasi.
 - c. Penguatan lembaga pemberi bantuan dan kerja sama pembangunan internasional.
 - d. Peningkatan peran Indonesia di tingkat regional dan global, melalui peningkatan inisiasi/posisi Indonesia yang diterima di tingkat regional dan global.
2. Arah kebijakan Penegakan Hukum Nasional, dilaksanakan dengan strategi penguatan sistem anti korupsi, melalui strategi optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan secara menyeluruh serta pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan.

3. Arah kebijakan Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, dilaksanakan dengan strategi:
 - a. Penguatan keamanan laut, melalui penguatan kapasitas operasi keamanan laut.
 - b. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, melalui pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh:

1. Badan Kebijakan Fiskal;
2. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
3. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; dan
4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Selain itu, dalam Agenda Pembangunan 7 ini, terdapat 1 (satu) target pembangunan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6
Target Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024
Yang terkait dengan Kementerian Keuangan

Sasaran	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Persentase Instansi Pemerintah Pusat (K/L) yang Mendapatkan Opini WTP	91%	92%	93%	94%	95%

3.2 Tujuan dan Sasaran RKPD BKAD

Tujuan

Tujuan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Labuhanbatu Selatan masih mengacu kepada Renstra BPKAD Kab. Labuhanbatu Selatan TA 2021-2026, maka penyesuaian nantinya perlu dilakukan. Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kepala Daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai dan berfungsi sebagai panduan dalam mengukur dan menilai pencapaian visi dan misi tersebut.

Tujuan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 - 2026 harus lebih tajam dari misi, tetapi masih cukup luas untuk dapat mendorong lahirnya kreatifitas dan inovasi untuk mencapainya bagi semua unit kerja yang ada di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Adapun rumusan tujuan yang ingin dicapai dalam Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026 yaitu disajikan dalam Tabel 3.1.

Untuk itu diharapkan seluruh aparatur pada Badan Keuangan dan Aset Daerah senantiasa berkomitmen serta berusaha bekerja semaksimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan, tanggap, kreatif dan mampu mengambil inisiatif dalam perbaikan sistem dan pola kerja.

Sasaran

Dari tujuan yang diinginkan tersebut maka ditetapkan sasaran yang akan dicapai untuk mengimplementasikan misi ke 3 (tiga) dari bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang dapat disajikan dalam Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran Dan Target Kinerja Sasaran Jangka Menengah
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) (2021)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
					Tahun- I (2022)	Tahun-II (2023)	Tahun-III (2024)	Tahun-IV (2025)	Tahun-V (2026)		
Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih (Good Governance Dan Clean Governance Serta Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK Atas Laporan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan APBD tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
		Persentase Anggaran Urusan Pendidikan yang Terakomodir dalam APBD	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
		Persentase Anggaran Urusan Kesehatan yang Terakomodir dalam APBD	%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
		Persentase Silpa Terhadap APBD	%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
		Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
		Ketepatan Waktu Penyusunan Pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
		Laporan Keuangan Kabupaten Unaudited dan Audited BPK RI tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
		Aplikasi Pengelolaan Keuangan	Aplikasi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		Aplikasi Penggajian Pegawai	Aplikasi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		Buku induk inventaris pengelolaan aset	Buku	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		Dokumen penghapusan aset	Dokumen	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		Aplikasi Pengelolaan BMD	Aplikasi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
Aplikasi Satuan Harga Standar	Aplikasi	Belum Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia		

3.3 Program dan Kegiatan

3.2.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menelaah visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

Visi Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan terpilih periode 2025-2029 yaitu :

“LABUHANBATU SELATAN YANG SEMAKIN MODERN”.

Untuk mencapai visi dimaksud, maka dirumuskan Misi sebagai berikut:

1. Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Sosialnya Diwujudkan untuk Membangun SDM yang Berkualitas dan Memiliki Daya Saing yang Hebat;
2. Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Ekonominya diwujudkan untuk Membangun Perekonomian yang Kuat, Inklusif, dan untuk kesejahteraan Masyarakat;
3. Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Tata Kelola Pemerintahannya Memberikan Pelayanan Prima, dan Memiliki Birokrasi yang Bersih, Lincah, serta Responsif;
4. Labuhanbatu Selatan yang Wilayahnya Aman, Tentram, Damai, dan Nyaman untuk Hidup maupun Beraktivitas;
5. Labuhanbatu Selatan yang Pembangunannya untuk Menciptakan Lingkungan yang Lestari dan Berbudaya;
6. Labuhanbatu Selatan yang Pembangunan Wilayahnya Merata, Adil, dan Menciptakan Produk Keunggulan Daerah yang Berkualitas Tinggi;
7. Labuhanbatu Selatan yang Pembangunannya ditujukan untuk Sarana dan Prasarana serta Infrastruktur Publik yang Berkualitas, Memadai dan Merata;
8. Labuhanbatu Selatan yang Pembangunannya Berkesinambungan, Berkadil, Bermartabat.

3.2.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis masih mengacu kepada Renstra BKAD TA 2021-2026. Salah satu upaya antisipasi yang dibutuhkan adalah mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Adapun isu strategis yang sangat mempengaruhi kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah :

1. Penyusunan APBD dan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara tepat waktu.
2. Penyusunan laporan keuangan tepat waktu dan peningkatan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pengelolaan dan Aset Daerah.
4. Pengelolaan kekayaan dan aset daerah perlu dilakukan secara professional, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pengelolaan Aset Daerah secara tertib dan benar.

Atas dasar itulah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan harus mampu memberikan perbaikan pelayanan dan meningkatkan pemahaman aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga tercapai target pengelolaan keuangan dan aset yang telah direncanakan.

Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dalam ketepatan penyampaian, efisiensi belanja daerah dan optimalisasi pelaksanaan program/kegiatan serta pengelolaan dan penatausahaan aset daerah dilakukan secara profesional sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku juga sangat mempengaruhi terhadap isu-isu strategis didalam upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang dihadapi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

3.2.3 Rekapitulasi Program dan Kegiatan

3.2.3.1 Strategi

Strategi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Labuhanbatu Selatan masih mengacu kepada Renstra BKAD Kab. Labuhanbatu Selatan TA 2021-2026. Strategi yang akan dilaksanakan adalah mengotimalkan segala kekuatan internal serta penguatan kelembagaan dan kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas sebagai pengelola keuangan dan aset daerah. Kemudian akan meminimalisir faktor kelemahan internal seperti keterbatasan personil, keterbatasan sumber daya manusia, masih terbatasnya pemahaman aparatur terhadap makna pelayanan publik, masih terbatasnya akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam gambaran tersebut disusun strategi yang akan dilaksanakan terdiri dari :

1. Perencanaan dan penganggaran belanja daerah dan pelaporan keuangan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
2. Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan pemenuhan SDM yang handal.
3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
4. Melaksanakan peningkatan pembinaan mengenai pengelolaan aset daerah.
5. Verifikasi, klasifikasi dan penilaian, monitoring dan investigasi aset daerah.

3.2.3.2 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Labuhanbatu Selatan mengacu kepada Renstra BKAD Kab. Labuhanbatu Selatan TA 2021-2026. Dalam pencapaian tujuan keberhasilan organisasi dirumuskan dalam kebijakan yang menuntun bagaimana program dan kegiatan organisasi harus dilaksanakan. Untuk menentukan kebijakan agar berhasil dengan baik harus memperhatikan faktor penentu keberhasilan dan kegagalan. Arah dan kebijakan yang dirumuskan dalam menentukan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan Peraturan Daerah/Bupati tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Penerapan penyusunan penganggaran serta penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai jadwal dan standar Akuntansi Pemerintah.
3. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan prima;
4. Efektifitas dan efesiensi pelaksanaan kegiatan OPD yang transparan dan bertanggungjawab yang tersaji dalam suatu proses manajemen;
5. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi di bidang pengelolaan keuangan daerah.
6. Pengembangan Kualitas, kapasitas, kompetensi dan peningkatan integritas dan nilai etika aparatur
7. Penerapan penyusunan penganggaran sesuai dengan dokumen perencanaan, analisa standar belanja dan standar satuan harga.
8. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah
9. Monitoring dan Verifikasi data mutasi Barang Milik Daerah
10. Evaluasi Penyusunan dan Rencan Kebutuhan Barang Milik Daerah

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Badan Pengeloaaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Visi : Labuhanbatu Selatan Sejahtera dan Bermartabat			
Misi 3 : Mewujudkan Labuhanbatu Selatan dalam pemerintahan yang bersih dan Bebas dari KKN			
1.Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih (Good Governance Dan Clean Governance Serta Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima	1. Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan	1. Perencanaan dan penganggaran belanja daerah dan pelaporan keuangan disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku	1. Menciptakan Peraturan Daerah/Bupati tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Penerapan penyusunan penganggaran serta penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai jadwal dan standar Akuntansi Pemerintah.
		2. Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan pemenuhan SDM yang handal.	1. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan prima 2. Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan OPD yang transparan dan bertanggungjawab yang tersaji dalam suatu proses manajemen
		3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan daerah.	1. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi di bidang pengelolaan keuangan daerah. 2. Pengembangan Kualitas, kapasitas, kompetensi dan peningkatan integritas dan nilai etika aparatur
		4. Melaksanakan peningkatan pembinaan mengenai pengelolaan aset daerah	1. Penerapan penyusunan penganggaran sesuai dengan dokumen perencanaan, analisa standar belanja dan standar satuan harga. 2. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah
		5. Verifikasi, klasifikasi dan penilaian, monitoring dan investigasi aset daerah	1. Monitoring dan Verifikasi data mutasi BMD 2. Evaluasi Penyusunan dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

3.2.3.3 Program dan Kegiatan

Sebagai Perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2026, Prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional BKAD adalah Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, berkualitas dan berwibawa melalui peningkatan profesionalisme aparatur BKAD dalam tata kelola dan pelayanan administrasi Keuangan daerah.

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional.

Dengan ditetapkannya tujuan, strategi dan kebijakan, maka untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan misi BKAD, disusunlah program-program yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator yang telah ditentukan dalam Rencana Kerja (Renja) BKAD Tahun 2026 serta prakiraan maju tahun 2027 direncanakan melalui program dan kegiatan yang dapat dilihat pada lampiran.

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Tahun 2026 ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026, guna tetap mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang terarah, terpadu, komprehensif dan berkesinambungan.

Terarah, terpadu, komprehensif dan berkesinambungan artinya adanya kesesuaian antara perencanaan pembangunan pada periode Kepala Daerah saat ini dengan Kepala Daerah berikutnya sehingga target pembangunan dapat tercapai secara optimal dalam kaitan tersebut, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dalam mengawal implementasi Rencana Kerja (Renja) BKAD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2026, yang meliputi :

1. Setiap elemen dalam lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan berkewajiban untuk mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dengan sebaik-baiknya;
2. Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2026 menjadi pedoman setiap bidang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang menjabarkan lebih lanjut visi, misi dan agenda serta berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan secara terukur, terarah dan dapat dilaksanakan pada tahapan rencana tahunan, termasuk secara kreatif dan inovatif mendesain program-program terobosan dan prioritas sebagai upaya percepatan mengejar ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Lebih dari itu tujuan dari perencanaan yang baik tidak sekedar untuk menghasilkan dokumen rencana yang tersusun rapi. Oleh karenanya komitmen seluruh aparat pemerintah menjadi bagian penting untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan, baik sasaran kuantitatif maupun kualitatif. Dukungan semua pihak demi terlaksananya program-program dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2026 ini menjadi jaminan atas pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan. Untuk itu kepedulian, kebersamaan dan partisipasi seluruh institusi dan elemen masyarakat diharapkan dapat tercurah secara maksimal dalam seluruh tahapan pembangunan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2026 disusun sebagai pedoman tahunan untuk peningkatan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam rangka mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Kotapinang, Juni 2025

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

**IMRON ROSADI SIREGAR, S.Pd, M.M.
PEMBINA Tk. I (IV/b)
NIP. 19731110 199903 1 004.**



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Lintas Sumatera, Komplek Perkantoran Pemkab Labuhanbatu Selatan,
Kotapinang, Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara 21464,
Laman bkad.labuhanbatuselatankab.go.id,
Pos-el bkad@labuhanbatuselatankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 900 /468/BKAD /2024**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, serta pelaksanaan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

- Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2012 Nomor 18 Seri D Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017 Nomor 4 Seri D Nomor 04);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09)
20. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhnabtu Selatan Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhnabtu Selatan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
Pada tanggal **13** Maret 2024

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN



IMRON ROSADI SIREGAR, S. Pd
Pembina Tk.I (IV/b)
Nip. 19731110 199903 1 004

- Nama OPD : **BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**
- Tugas : Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah dan kewenangan otonomi daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- Fungsi :
- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD
 - c. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. Penyusunan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - e. Merumuskan penetapan Perda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD dan PAPBD ;
 - f. Merumuskan penetapan kebijakan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - g. Merumuskan kebijakan operasional pengelolaan keuangan daerah sebagai pedoman pelaksanaan APBD;
 - h. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD)
 - i. Melaksanakan pengesahan DPA–SKPD dan DPPA–SKPD
 - j. Menyelenggarakan pembinaan pengelolaan keuangan dan barang daerah
 - k. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi tentang Pengelolaan Investasi, Aset daerah, BUMD, pinjaman dan obligasi daerah serta BLU Kabupaten
 - l. Merumuskan perhitungan alokasi DAU dan realisasi dana bagi hasil serta usulan program untuk didanai dari DAK;
 - m. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Bupati

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama SKPD	Satuan	Bidang Urusan	Formulasi	Keterangan
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	1. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	Urusan Keuangan	1. Opini BPK RI	
		2. Penetapan Laporan Keuangan Kabupaten Tepat Waktu	Tepat waktu		2. Paling Lambat tanggal 31 Maret Tahun Berjalan Penyampaian Laporan Keuangan ke BPK RI	
		3. Penetapan Waktu Penyusunan Rancangan APBD tepat waktu	Tepat waktu		3. 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal Persetujuan Rancangan Peraturan daerah tentang APBD untuk di Evaluasi sebelum ditetapkan	
		4. Persentase Anggaran Urusan Pendidikan yang terakomodir dalam APBD	%		4. 20% Anggaran Urusan Pendidikan yang terakomodir dalam APBD	
		5. Persentase Anggaran Urusan Kesehatan yang terakomodir dalam APBD	%		5. 10% Anggaran Urusan Kesehatan yang terakomodir dalam APBD	
		6. Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	%		6. 10% Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	
		7. Penetapan waktu penyampaian pertanggungjawaban APBD	Tepat Waktu		7. 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal Persetujuan Rancangan Peraturan daerah tentang APBD untuk di Evaluasi sebelum ditetapkan	
		8. Tersedianya Buku induk inventaris pengelolaan aset	Buku		8. Tersedianya Buku induk inventaris pengelolaan aset	
		9. Tersedianya Dokumen penghapusan aset	Dokumen		9. Tersedianya Dokumen penghapusan aset	
		10. Tersedianya Aplikasi Pengelolaan BMD	Aplikasi		10. Tersedianya Aplikasi Pengelolaan BMD	
		11. Tersedianya Aplikasi Satuan Harga Standar	Aplikasi		11. Tersedianya Aplikasi Satuan Harga Standar	

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN



IMRON ROSADI SIREGAR, S. Pd
Pembina Tk.I (IV/b)
Nip. 19731110 199903 1 004

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RENJA)
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2026

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
5																	
5	02				143.018.091.768.00	147.805.799.930			158.211.353.151							178.152.901.466	
5	02	01			16.915.745.463.00	18.846.002.867			13.296.712.198							19.026.383.418	
5	02	01	2.01		15.526.964	15.756.973			32.807.830							36.088.614	
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.866.736	3.853.702	3 Dokumen	5.222.854	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD			3 Dokumen	5.745.139	BKAD
5	02	01	2.02	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.709.336	3.720.109	1 Dokumen	6.402.919	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD			1 Dokumen	7.043.211	BKAD
5	02	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	3.772.084	3.826.784	1 Dokumen	6.472.596	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD			1 Dokumen	7.119.856	BKAD
5	02	01	2.04	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-	1.614.580	1.657.569	1 Dokumen	6.295.938	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD			1 Dokumen	6.925.532	BKAD
5	02	01	2.05	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.554.700	1.613.590	1 Laporan	6.320.926	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD			1 Laporan	6.953.019	BKAD
5	02	01	2.06	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.009.528	1.085.219	1 Laporan	2.092.597	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD			1 Laporan	2.301.857	BKAD
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		13.967.987.896.00	16.483.535.443		10.876.500.393						16.364.150.432	
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13.820.002.696.00	16.138.102.434	240 Orang/bulan	10.531.741.792	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD			240 Orang/bulan	15.984.915.971	BKAD
5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	76.205.200.00	52.063.727	1 Dokumen	51.375.833	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD			1 Dokumen	56.513.416	BKAD
5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	71.780.000.00	293.369.282	1 Dokumen	293.382.768	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD			1 Dokumen	322.721.045	BKAD
5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	0 Laporan	0	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD			0 Laporan	0	BKAD
5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	0	0 Laporan	0	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD			0 Laporan	0	BKAD
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		102.320.500.00	314.849.961		365.236.945						401.760.639	
5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	94.960.500.00	104.459.418	5 Paket	132.206.402	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD			5 Paket	145.427.042	BKAD
5	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	148.789.143	33 Orang	148.789.143	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD			33 Orang	163.668.057	BKAD
5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7.360.000.00	61.601.400	10 Orang	84.241.400	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD			10 Orang	92.665.540	BKAD

Kode	Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			607.567.844,00	623.850.616		590.300.003						649.330.004		
5 02 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang		10.526.000,00	26.130.639	1 Paket	13.850.606	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD			1 Paket	15.235.667	BKAD	
5 02 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		59.939.000,00	11.065.352	1 Paket	15.153.701	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD			1 Paket	16.669.071	BKAD	
5 02 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan		27.328.000,00	48.855.055	1 Paket	32.057.160	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD			1 Paket	35.262.876	BKAD	
5 02 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0	0	Dokumen	-	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD			Dokumen	-	BKAD	
5 02 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		44.393.900,00	30.425.120	1 Laporan	25.401.756	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD			1 Laporan	27.941.932	BKAD	
5 02 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		465.380.944,00	507.374.450	30 Laporan	503.836.780	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD			30 Laporan	554.220.458	BKAD	
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			791.176.600,00	231.988.680		159.097.955						175.007.750		
5 02 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		665.200.000	0	0 Unit	-	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD			0 Unit	-	BKAD	
5 02 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		14.763.000,00	104.145.236	13 Unit	53.498.630	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD			13 Unit	58.848.493	BKAD	
5 02 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		111.213.600,00	127.843.444	8 Unit	105.599.325	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD			8 Unit	116.159.257	BKAD	
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			746.422.744,00	704.212.300		866.649.512						953.314.463		
5 02 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0	0	0 Laporan	-	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD			0 Laporan	-	BKAD	
5 02 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		322.722.744,00	188.046.300	2 Laporan	386.879.652	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD			2 Laporan	425.567.617	BKAD	
5 02 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		60.000.000,00	60.000.000	1 Laporan	60.000.000	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD			1 Laporan	66.000.000	BKAD	
5 02 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		363.700.000,00	456.166.000	15 Laporan	419.769.860	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD			15 Laporan	461.746.846	BKAD	
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			684.742.915,00	471.808.894		406.119.560						446.731.516		
5 02 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Paiknya		38.142.050	38.420.000	1 Unit	38.420.000	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD			1 Unit	42.262.000	BKAD	
5 02 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		266.901.565,00	277.339.894	14 Unit	278.999.560	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD			14 Unit	306.899.516	BKAD	
5 02 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		32.036.000,00	64.549.000	23 Unit	31.400.000	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD			23 Unit	34.540.000	BKAD	
5 02 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		347.663.300,00	91.500.000	2 Unit	57.300.000	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD			2 Unit	63.030.000	BKAD	
5 02 02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah			125.165.845.531,00	128.079.097.375		143.060.624.265						157.087.099.690		
5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			1.274.442.913,00	1.266.776.056		1.641.742.693						1.526.329.961		

Kode	Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 02 2.01 0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun		15.285.110,00	17.748.155	2 Dokumen	18.524.892	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD		Daerah		2 Dokumen	20.377.381	BKAD
5 02 02 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun		14.192.350,00	17.864.364	2 Dokumen	18.929.092	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD		Daerah		2 Dokumen	20.822.001	BKAD
5 02 02 2.01 0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi		7.504.500,00	17.555.422	33 Dokumen	9.675.100	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD		Daerah		33 Dokumen	10.642.610	BKAD
5 02 02 2.01 0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi		7.301.890,00	17.615.575	33 Dokumen	9.446.340	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD		Daerah		33 Dokumen	10.390.974	BKAD
5 02 02 2.01 0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA - SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi		7.509.084	17.555.422	33 Dokumen	8.637.079	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD		Daerah		33 Dokumen	9.500.787	BKAD
5 02 02 2.01 0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi		7.370.440	17.615.575	33 Dokumen	8.655.561	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD		Daerah		33 Dokumen	9.521.117	BKAD
5 02 02 2.01 0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		460.479.676,00	496.390.662	2 Dokumen	276.342.441	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD		Daerah		2 Dokumen	303.976.685	BKAD
5 02 02 2.01 0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		404.688.090,00	438.232.586	2 Dokumen	282.411.631	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD		Daerah		2 Dokumen	31.065.794	BKAD
5 02 02 2.01 0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		350.111.773,00	226.198.295	1 Dokumen	85.370.571	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD		Daerah		1 Dokumen	93.907.628	BKAD
5 02 02 2.01 0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		0,00	0	1 Dokumen	9.704.394	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD		Daerah		1 Dokumen	10.674.833	BKAD
5 02 02 2.01 0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		0,00	0	1 Dokumen	547.727.438	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD		Daerah		1 Dokumen	602.500.182	BKAD
5 02 02 2.01 0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		0,00	0	1 Dokumen	9.633.563	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD		Daerah		1 Dokumen	10.596.919	BKAD
5 02 02 2.01 0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		0,00	0	120 Orang	356.684.591	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD		Daerah		120 Orang	392.353.050	BKAD
5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			188.427.858,00	327.246.485		757.918.273							833.710.099	
5 02 02 2.02 0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		52.693.058,00	66.291.235	1 Dokumen	76.733.325	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD		Daerah		1 Dokumen	84.406.657	BKAD
5 02 02 2.02 0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		0	0	0 Laporan	-	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD		Daerah		0 Laporan	-	BKAD
5 02 02 2.02 0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		7.124.000,00	12.168.991	33 Dokumen	29.293.952	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD		Daerah		33 Dokumen	32.223.347	BKAD
5 02 02 2.02 0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah		0	0	1 Dokumen	-	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD		Daerah		1 Dokumen	-	BKAD
5 02 02 2.02 0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan		0	0	0 Dokumen	-	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD		Daerah		0 Dokumen	-	BKAD
5 02 02 2.02 0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		24.802.900,00	44.995.927	1 Dokumen	55.505.443	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD		Daerah		1 Dokumen	61.055.987	BKAD

Kode	Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		54.475.700,00	62.046.627	1 Laporan	113.608.765	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD		Daerah	1 Laporan	124.969.641	BKAD
5	02	02	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai		0	0	1 Dokumen	-	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD		Daerah	1 Dokumen	-	BKAD
5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi		22.482.300,00	24.270.543	1 Dokumen	64.079.803	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD		Daerah	1 Dokumen	70.487.783	BKAD
5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub		26.849.900,00	73.121.925	1 Dokumen	101.710.149	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD		Daerah	1 Dokumen	111.881.164	BKAD
5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		0	44.351.237	33 Orang	316.986.836	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD		Daerah	33 Orang	348.685.520	BKAD
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			750.058.832,00	985.399.882		1.005.420.716						1.105.962.788	
5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		0	0	1 Laporan	-	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD		Daerah	1 Laporan	-	BKAD
5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban		0	0	0 Dokumen	-	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD		Daerah	0 Dokumen	-	BKAD
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Trivulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Trivulanan dan Semesteran		15.806.100,00	16.305.422	18 Laporan	23.689.989	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD		Daerah	18 Laporan	26.058.988	BKAD
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi		171.214.642,00	200.999.274	1 Laporan	230.123.788	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD		Daerah	1 Laporan	253.136.167	BKAD
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		267.020.000,00	429.027.625	2 Dokumen	434.620.103	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD		Daerah	2 Dokumen	478.082.113	BKAD
5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		0	49.696.770	0 Dokumen	-	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD		Daerah	0 Dokumen	-	BKAD

Kode	Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 02 2.03 0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		20.305.110,00	40.004.418	1 Dokumen	-	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD		Daerah	1 Dokumen	-	BKAD	
5 02 02 2.03 0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		275.712.980,00	249.366.373	33 Orang	316.986.836	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD		Daerah	33 Orang	348.685.520	BKAD	
5 02 02 2.03 0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina		0	0	0 Lembaga	-	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD		Daerah	0 Lembaga	-	BKAD	
5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			122.952.915.928,00	125.499.674.952		139.655.542.583						153.621.096.842		
5 02 02 2.04 0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		120.596.865.392,00	117.534.811.960	4 Laporan	123.670.653.600	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD		Daerah	4 Laporan	136.037.718.960	BKAD	
5 02 02 2.04 0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		17.980.000,00	3.047.948.369	1 Laporan	7.800.000.000	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD		Daerah	1 Laporan	8.580.000.000	BKAD	
5 02 02 2.04 0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota		2.338.070.536,00	4.916.914.623	2 Laporan	8.184.888.983	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD		Daerah	2 Laporan	9.003.377.882	BKAD	
5 02 02 2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			0,00	0		-						-		
5 02 03 2.05 0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		0	0	0 Dokumen	-	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD			0 Dokumen	-	BKAD	
5 02 03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah			936.500.774,00	880.699.688		1.854.016.688						2.039.418.358		
5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			936.500.774,00	880.699.688		1.854.016.688						2.039.418.358		
5 02 03 2.01 0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun		63.251.600,00	86.038.725	1 Dokumen	91.022.920	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD		Daerah	1 Dokumen	100.125.212	BKAD	
5 02 03 2.01 0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah		20.784.800,00	19.326.336	1 Dokumen	30.315.757	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD		Daerah	1 Dokumen	33.347.333	BKAD	
5 02 03 2.01 0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		0	0	0 Dokumen	-	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD		Daerah	0 Dokumen	-	BKAD	
5 02 03 2.01 0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		33.384.300,00	53.307.073	1 Dokumen	53.669.536	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD		Daerah	1 Dokumen	59.036.490	BKAD	
5 02 03 2.01 0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah		0	0	0 Laporan	-	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD		Daerah	0 Laporan	-	BKAD	
5 02 03 2.01 0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah		81.610.239,00	148.017.440	1 Laporan	150.259.536	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD		Daerah	1 Laporan	165.285.490	BKAD	
5 02 03 2.01 0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah		459.166.220,00	154.562.599	1 Laporan	462.441.509	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD		Daerah	1 Laporan	508.685.660	BKAD	
5 02 03 2.01 0008	Penilaian Barang Milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah		37.190.400,00	106.871.780	1 Laporan	122.285.293	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD		Daerah	1 Laporan	134.513.822	BKAD	
5 02 03 2.01 0009	Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik		90.919.800,00	44.039.477	1 Laporan	91.063.247	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD		Daerah	1 Laporan	100.169.572	BKAD	

Kode	Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		48.471.115,00	129.687.808	1 Dokumen	451.194.429	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD		Daerah		1 Dokumen	496.313.872	BKAD
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang		63.347.900,00	74.079.412	1 Laporan	97.432.443	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD		Daerah		1 Laporan	107.175.687	BKAD
5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun		30.003.400,00	30.149.558	1 Laporan	42.132.002	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD		Daerah		1 Laporan	46.345.202	BKAD
5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		8.371.000,00	34.619.480	66 Orang	262.200.016	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	APBD		Daerah		66 Orang	288.420.018	BKAD

Kotapinang, Juni 2025

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

IMRON ROSADI SIREGAR, S. Pd
PEMBINA Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19731110 199903 1 004

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						158.211.353.151,00							178.152.901.466,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						158.211.353.151,00							178.152.901.466,00	
	5.02	KEUANGAN						158.211.353.151,00							178.152.901.466,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	13.296.712.198,00						-	19.026.383.418,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	32.807.830,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan Meningkatk an Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik	-	-	36.088.614,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				3 Dokumen	5.222.854,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan Meningkatk an Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik	-		5.745.139,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	6.402.919,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan Meningkatk an Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik	-		7.043.211,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	6.472.596,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		7.119.856,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	6.295.938,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		6.925.532,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	6.320.926,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		6.953.019,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	2.092.597,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		2.301.857,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	10.876.500.393,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan Meningkatk an Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik	-	-	16.364.150.432,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				21 Orang/bulan	10.531.741.792,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan Meningkatk an Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik	-		15.984.915.971,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				1 Dokumen	51.375.833,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan Meningkatk an Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik	-		56.513.416,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1 Dokumen	293.382.768,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pem erintahan Meningkatk an Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik	-		322.721.045,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	365.236.945,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	401.760.639,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				5 Paket	132.206.402,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		145.427.042,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				33 Orang	148.789.143,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		163.668.057,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				10 Orang	84.241.400,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		92.665.540,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	590.300.003,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	649.330.004,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	13.850.606,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		15.235.667,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	15.153.701,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		16.669.071,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	32.057.160,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		35.262.876,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	25.401.756,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		27.941.932,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				30 Laporan	503.836.780,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		554.220.458,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	159.097.955,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	175.007.750,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				13 Unit	53.498.630,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		58.848.493,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				8 Unit	105.599.325,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		116.159.257,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	866.649.512,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	953.314.463,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				2 Laporan	386.879.652,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		425.567.617,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	60.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		66.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				15 Laporan	419.769.860,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		461.746.846,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	406.119.560,00			-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	446.731.516,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	38.420.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		42.262.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				14 Unit	278.999.560,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		306.899.516,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				23 Unit	31.400.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		34.540.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	57.300.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		63.030.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-			-	143.060.624.265,00						-	157.087.099.690,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-			-	1.641.742.693,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	1.526.329.961,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			<i>Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun</i>				2 Dokumen	18.524.892,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		20.377.381,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun</i>				2 Dokumen	18.929.092,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		20.822.001,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD														
			<i>Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>				33 Dokumen	9.675.100,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		10.642.610,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>				33 Dokumen	9.446.340,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		10.390.974,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD														
			<i>Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi</i>				33 Dokumen	8.637.079,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		9.500.787,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi</i>				33 Dokumen	8.655.561,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		9.521.117,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</i>				2 Dokumen	276.342.441,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		303.976.685,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</i>				2 Dokumen	282.411.631,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		31.065.794,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran</i>				1 Dokumen	85.370.571,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		93.907.628,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan</i>				1 Dokumen	9.704.394,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		10.674.833,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah</i>				1 Dokumen	547.727.438,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		602.500.182,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan</i>				1 Dokumen	9.633.563,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		10.596.919,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				120 Orang	356.684.591,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		392.353.050,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-			-	757.918.273,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	833.710.099,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</i>				1 Dokumen	76.733.325,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		84.406.657,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD</i>				33 Dokumen	29.293.952,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		32.223.347,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank</i>				1 Dokumen	55.505.443,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		61.055.987,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Potongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														
			<i>Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Potongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Potongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)</i>				1 Laporan	113.608.765,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		124.969.641,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Potongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Potongan atas SP2D dengan Instansi Terkait</i>				1 Dokumen	64.079.803,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		70.487.783,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan</i>				1 Dokumen	101.710.149,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		111.881.164,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				33 Orang	316.986.836,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		348.685.520,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-			-	1.005.420.716,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	1.105.962.788,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
			<i>Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran</i>				18 Laporan	23.689.989,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		26.058.988,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi</i>				1 Laporan	230.123.788,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		253.136.167,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</i>				2 Dokumen	434.620.103,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		478.082.113,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				99 Orang	316.986.836,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		348.685.520,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-			-	139.655.542.583,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	153.621.096.842,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</i>				4 Laporan	123.670.653.600,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA DESA	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		136.037.718.960,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</i>				1 Laporan	7.800.000.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		8.580.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota</i>				2 Laporan	8.184.888.983,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH - LRA	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		9.003.377.882,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-			-	1.854.016.688,00						-	2.039.418.358,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-			-	1.854.016.688,00			-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	2.039.418.358,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Standar Harga yang Disusun</i>				1 Dokumen	91.022.920,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		100.125.212,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>				1 Dokumen	30.315.757,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		33.347.333,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>				1 Dokumen	53.669.536,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		59.036.490,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	150.259.536,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		165.285.490,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	462.441.509,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		508.685.660,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	122.285.293,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		134.513.822,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	91.063.247,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		100.169.572,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</i>				1 Dokumen	451.194.429,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		496.313.872,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	97.432.443,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		107.175.687,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun</i>				1 Laporan	42.132.002,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		46.345.202,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				66 Orang	262.200.016,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		288.420.018,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
J U M L A H								158.211.353.151,00							178.152.901.466,00	